



NOTARIS / PPAT
MADE RITA, S.H., M.Kn.

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
No. : AHU - 06. AH. 02.02 - Th. 2009 TANGGAL 3 PEBRUARI 2009
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
No. : 9 - XVII - PPAT - 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008
Jl. Mayor Sujadi No. 33 Telp. (0355) 332429
TULUNGAGUNG 66218

A K T A

: PENDIRIAN YAYASAN PEMBINA LEMBAGA

PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN

GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG

NOMOR

: - 2 -

TANGGAL

: 5 Agustus 2010

SALINAN / GROSSE KE

: Pertama

AKTA PENDIRIAN

"YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG"

Nomor : .2.

Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 (lima) Agustus 2010 (dua ribu ----
sepuluh), jam 11.30 (sebelas titik tiga puluh) Waktu Indonesia ----
Barat, -----

menghadap kepada saya, MADE RITA, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tulungagung, dengan dihadiri ---
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, yang akan disebut -----
dibagian akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus **MUCHAMAD ASTIHAM**, Magister Management, lahir di
Trenggalek, pada tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1942 (seribu -
sembilan ratus empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mayor Jendral -
Soeprapto I/39, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Kelurahan --
Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
3504013011420001; -----
2. Tuan Doktorandus Haji **LUCKMAN SUKADJI**, Magister Management, ----
lahir di Tulungagung, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember -
1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara ---
Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan ----
Panglima Jendral Sudirman, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004, --
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten -----
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3504012211440001; -----
3. Tuan Doktorandus **SOESENSO**, Magister Management, lahir di -----
Tulungagung, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 1939 ---
(seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan ----
I Gusti Ngurah Rai 2 nomor 27, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga --
002, Kelurahan Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten -----
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -



Kependudukan 3504013112390002; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa --
dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili : -----

- **Tuan Doktorandus Haji WADJI SUHARDJO**, Magister Management,
lahir di Tulungagung, pada tanggal 25 (dua puluh lima) ---
Nopember 1937 (seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, Rukun Tetangga
02 Rukun Warga 03, Desa Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, --
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan 120315.251137.0001; -----

- demikian berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Berita --
Acara yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, ----
Nomor 282Y/PPLPPT/PGRI/TA/VIII/2010 tertanggal 05 (lima)-
Agustus 2010 (dua ribu sepuluh), yang aslinya dilekatkan-
pada minuta akta ini. -----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

-Para penghadap sebagaimana dalam kedudukannya tersebut di atas --
menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai sebanyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, para penghadap dengan ini mendirikan suatu yayasan ----
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama -----

----- **YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI** -----

----- **PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA TULUNGAGUNG** -----

(untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat ---
dengan Yayasan) berkedudukan di Kabupaten Tulungagung dan -----
berkantor pusat di Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7, -----
Desa Flosokandang, Kecamatan Kedungwaru. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat ---
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia --
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan pembina. ----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

a. Sosial. -----

b. Keagamaan. -----

c. Kemanusiaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dalam bidang Sosial yang meliputi : -----

a. mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal; -----

b. mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----

c. melakukan pembinaan olah raga; -----

d. mengadakan dan melakukan penelitian dibidang -----

ilmu pengetahuan; -----

e. mengadakan dan melakukan study banding; -----

f. mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----

2. Dalam bidang Keagamaan yang meliputi : -----

a. mendirikan sarana ibadah; -----

b. menyelenggarakan pondok pesantren; -----

c. menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sodakoh; -----

d. meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e. melaksanakan syiar keagamaan; -----

f. mengadakan serta melakukan study banding keagamaan. -----

3. Dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi : -----

a. memberikan bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

c. memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -----

gelandangan; -----

d. mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka; -----

e. memberikan perlindungan kepada konsumen; -----

f. melestarikan lingkungan hidup. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan --
lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan ---
pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar -----
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan --
Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf; -----
 - c. hibah; -----
 - d. hibah wasiat, dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran ----
Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang ---
berlaku. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksu
dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang ---
tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka ----

- seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota pembina adalah orang -----
perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang -----
berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai --
dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.---
 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh -----
Yayasan. -----
 6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai -----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ---
terjadi kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----
berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan -----
anggota pengurus. -----
 7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) ---
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya -----
apabila anggota pembina tersebut: -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 7; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan-
yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh bawah pengampunan -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota karena peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus -
dan atau anggota pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan ----- anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan ----- Anggaran Dasar ini; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran ----- tahunan Yayasan; -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau ----- pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -----

Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----

5. Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.
- Pasal 11 -----
1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul

ditolak. -----

5. Tata cara pemunggutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemunggutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----- terbuka dan ditandatangani kecuali Ketua Rapat membentuk ----- lain dan tidak keberatan dari yang hadir; -----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung ----- dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ----- ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak ----- disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta ----- Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan ----- Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota pembina telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang pembina, maka dia dapat ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun paling ----- lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan: -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan ----- tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi ----- perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang ----- akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus; -----

c. penetapan kebijakan umum Yayasan; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -----

tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat -----
tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan -----
Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan --
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan. -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan -----
kepengurusan yayasan, yang sekurang-kurangnya terdiri dari : ---
a. seorang Ketua; -----
b. seorang Sekretaris, dan -----
c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 ----
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Sekretaris, maka 1 ----
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka ---
1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. ----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----
tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk ----
jangka 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium -----
apabila pengurus Yayasan: -----

- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan pengawas, dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----- langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu ---- paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
 5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka ---- Waktu paling lama 30 (tiga puluh), hari sejak terjadinya ----- kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat ---- untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara ----- Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
 6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan ---- memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut ---- kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---- tanggal pengunduran dirinya. -----
 7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam --- Jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan Pembina wajib -- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri ---- Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----- dan Instansi terkait. -----
 8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----- Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 15 -----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----
2. mengundurkan diri; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan ----- pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit - 5 (lima) tahun; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rencana anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan pengawas.
4. Setiap anggota pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meniadakan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan yayasan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.
6. Perbuatan pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :
1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
 2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
 3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus atau pengawas Yayasan

atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan ----
tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota -----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas -----
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan ---
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-
sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak unti
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan -----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan dalam
hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenar
yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. ---
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal
hanya ada seorang bendahara, maka segala tugas dan wewenang yan
diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus -----
ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang ata
lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat Kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana -----
Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan -----
hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana -----
karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan -----

masyarakat atau negara berdasarkan Keputusan pengadilan -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
putusan tersebut berkuatan hukum tetap. -----

3. Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-
4. Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau -----
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat
pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara Yayasan dengan --
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota
pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus -----
lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ---
Yayasan. -----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan -----
dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili -----
diwakili oleh pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila -----
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -----
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -----
yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -----
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat -----
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) -----
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan -----
tanggal, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam -----
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----

2. Dalam hak ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan ----- yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) ----- jumlah Pengurus; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat ----- (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ----- (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) ----- hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 ----- (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ----- hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih ----- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak ----- tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih ----- dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka -- ----- usul ditolak. -----
4. Pemunggutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanda tangan, sedangkan ----- pemunggutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----- secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain -----

- dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam -----
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
 6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota -----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris ---
rapat. -----
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta -----
Notaris. -----
 8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah -----
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan -----
semua anggota Pengurus memberikan persetujuan -----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah orang Yayasan yang bertugas melakukan -----
Pengawasan dan memberi nasihat kepada pengurus dalam -----
Menjalankan kegiatan yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota -----
Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 -
(satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak ----
dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan hukum dan tidak --
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang ----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) ----

tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk -----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu -----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan --
Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan-
itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan
rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara -----
Yayasan diurus oleh pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, -----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 -----
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, -----
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari terhitung sejak tanggal dilakukan pengantian -----
pengawas yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan ----
secara tertulis kepada menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, -----
Pengurus atau pelaksana kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan -----

pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara -----

paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

5. masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

-----Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itekad baik penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, atau
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. memberi peringatan kepada pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian -----
sementara batal demi hukum dan ~~yang bersangkutan~~ -----
kembali jabatan semula. -----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
sementara Pengawas diwajibkan mengurus yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau
Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak -
mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas --
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ---
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal ---
rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,
dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat
kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. --

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka --
Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang ---
dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas -----
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang mengikat apabila: -----
 - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a

tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----
Pengawas kedua; -----

- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama; -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) jumlah anggota pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih
dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ---
usui ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua --
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang -----
ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota ----
pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris ---
rapat. -----
- 7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan -
apabila Berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. -----
- 8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----
mengadakan Rapat Pengawas dengan ketentuan semua Pengawas telah-

diberitahu secara tertulis dan semua pengawas memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan
menandatangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----
dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan ---
Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi --
mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) -----
hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. ----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat --
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan --
tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, ---
tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di ----
tempat kegiatan yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh ketua pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir maka
Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau ----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus --
atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas
yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya -
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya -

- dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan ---
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus
atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----
suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua --
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -
 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak -----
dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -
dari jumlah anggota pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari ----
jumlah anggota Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a -
tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan
kedua. -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat --
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 -----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari ---
terhitung sejak rapat gabungan pertama. -----
 - e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ -
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas -----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara -----

- berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) ---
bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. ---
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk --
pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) ora
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapa
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga -
tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak ----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta ----
notaris. -----
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil ---
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ---
ketentuan semua pengurus dan semua pengawas telah diberitahuka
secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberik
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, denga
menandatangani usul tersebut. -----
 8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam .
ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai
dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal -
dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh
satu) Desember 2010 (dua ribu sepuluh). -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling
lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang

- lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan --
pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan --
catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh pengurus -----
dan pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak ---
menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus --
menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar -
akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan -----
pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan --
keputusan rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit -----
2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan -----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -
seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak -----
tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua ---
paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina
yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih --
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan -
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau-
yang diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan -----

dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal ----- sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PEGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Peggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan ----- 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan yang lain dan ----- mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. --
2. Peggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa ----- dukungan Yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima peggabungan dan yang bergabung ----- kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan ----- perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya ----- ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul peggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ----- Pengurus kepada Pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Peggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 ----- (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui ----- paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari seluruh ----- jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri

- dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti kembali dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
 2. tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) ---
huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk -----
membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak -
sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuat
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses ----
likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua -
surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang na
Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka -----
pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku -----
peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian ---
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan ----
tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku ju
bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberes-
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan paling lambat ----
5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib -----
mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam --
surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi .
berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar -
harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) ha
terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib -----
melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana -----
dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana --

dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak -
berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likudasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam (1) --- dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud - dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan --- tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----- dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina ----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ----- ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata- cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas, untuk pertama- kalinya diangkat susunan Pembina Pengurus dan Pengawas ----- Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----

A. PEMBINA

: Tuan Doktorandus Haji WADJI SUHARDJO, -----

Magister Management, lahir di -----
Tulungagung, pada tanggal 25 (dua puluh ---
lima) Nopember 1937 (seribu sembilan -----
ratus tiga puluh tujuh), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai ----
Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Dusun Sukorejo, Rukun Tetangga 02 -----
Rukun Warga 03, Desa Rejoagung, -----
Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten -----

Tulungagung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -
120315.251137.0001 ; -----

B. PENGURUS : -----

- KETUA

: **Tuan Doktorandus MUCHAMAD ASTIHAM,** -----
Magister Management, lahir di -----
Trenggalek, pada tanggal 30 (tiga puluh) --
Nopember 1942 (seribu sembilan ratus -----
empat puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal --
di Jalan Mayor Jenderal Soeprapto I/39 ---
Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, -----
Kelurahan Kepatihan, Kecamatan -----
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----
Nomor Induk Kependudukan -----
3504013011420001; -----

- SEKRETARIS

: **Tuan Doctorandus Haji ABDUL MANAB,** -----
Magister Agama, lahir di Tulungagung, -----
pada tanggal 11 (sebelas) Desember 1952 --
(seribu sembilan ratus lima puluh dua), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai -
Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa --
Tawangsari, Kecamatan Kedungwaru, -----
Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3504031112520002 ; -----

- BENDAHARA

: **Tuan Doktorandus SOESENSO,** Magister -----
Management, lahir di Tulungagung, -----
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----
Desember 1939 (seribu sembilan ratus tiga
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, --
pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di

Jalan I Gusti Ngurah Rai 2 nomor 27 Rukun -
Tetangga 003 Rukun Warga 002, Kelurahan ---
Bago, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten ----
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk-
dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3504013112390002; -----

- ANGGOTA

: Tuan Doktorandus Haji SOEPARMAN, Magister -
Management, lahir di Tulungagung, pada ----
tanggal 02 (dua) Agustus 1935 -----
(seribu sembilan ratus tiga puluh lima), ---
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di-
Jalan Panglima Sudirman 7/28 Rukun -----
Tetangga 01 Rukun Warga 04, Kelurahan ----
Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten
Tulungagung, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan --
120314.020835.0001; -----

C. PENGAWAS
KETUA

: Tuan Doktorandus Haji SUNJOTO, Sarjana ----
Hukum, Magister of Science, lahir di -----
Tulungagung, pada tanggal, 22 (dua -----
puluh dua) April 1943 (seribu sembilan-----
ratus empat puluh tiga), Warga negara ----
Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat -
tinggal di Jalan Kyai Haji Rahmad Abdul ---
Fatah, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 003,-
Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru, ----
Kabupaten Tulungagung pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan 3504032204430001. -----

ANGGOTA

: Tuan Doktorandus Haji LUCKMAN SUKADJI, ----
Magister Management, lahir di Tulungagung,-
pada tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember --

1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Panglima Jenderal Sudirman, Rukun Tetangg 001 Rukun Warga 004, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3504012211440001;

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

- Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Pasal 44
Penghadap dengan ini menjamin akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI
dibuat dan diselesaikan di Tulungagung pada hari dan tanggal serta waktu sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh

1. nona DIAN SEPTI WULANDARI, lahir di Tulungagung, pada -----
tanggal 2 (dua) September 1988 (seribu sembilan ratus -----
delapan puluh delapan), bertempat tinggal di Rukun -----
Tetangga 01 Rukupn Warga 08 Desa Kepatihan, Kecamatan -----
Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. -----

2. nona ANIS NINGSIH, lahir di Pasuruan, pada tanggal 29 (dua puluh--
sembilan) Juli 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh -----
delapan), bertempat tinggal di jalan Mayor jenderal sungkono ---
no 20, Kelurahan Kutoanyar, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten ---
Tulungagung. -----

keduanya pegawai saya, Notaris sebagai saksi-saksi. -----
Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan
para saksi, maka kemudian para penghadap, para saksi dan saya, ---
Notaris, menandatangani akta ini. -----
Dilaksanakan dengan tanpa memakai perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di kabupaten Tulungagung.

